
**DAMPAK ANGKA PUTUS SEKOLAH TERHADAP DAYA SAING TENAGA KERJA:
STUDI KOMPARATIF: 4 NEGARA ASEAN**M. Fadilurrahman¹, Ahmad Ruspandi²Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia¹Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia²Email: 2410311210001@mhs.ulm.ac.id²

Abstract: *This study compares school dropout rates and labor competitiveness in Indonesia, Malaysia, the Philippines, and Thailand using World Bank data (2019–2023). Results show that Indonesia has the highest school completion rate (99.39%) but low labor productivity (USD 26,989), far below Malaysia (USD 64,128) and Thailand (USD 36,919). Malaysia, despite having the lowest completion rate (77.97%), achieves the highest productivity. Indonesia also spends the least on education (1.03% of GDP). The study concludes that low dropout rates alone do not improve labor competitiveness without quality education. It recommends Indonesia shift focus from quantity to quality, align curriculum with industry, and strengthen vocational training.*

Keywords: *school dropout, labor competitiveness, productivity, education expenditure, ASEAN*

Abstrak: Penelitian ini membandingkan angka putus sekolah dan daya saing tenaga kerja di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand menggunakan data World Bank (2019–2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tingkat penyelesaian sekolah tertinggi (99,39%) tetapi produktivitas tenaga kerjanya rendah (USD 26.989), jauh di bawah Malaysia (USD 64.128) dan Thailand (USD 36.919). Malaysia, meskipun memiliki tingkat penyelesaian sekolah terendah (77,97%), justru mencapai produktivitas tertinggi. Indonesia juga mengeluarkan anggaran pendidikan paling kecil (1,03% dari PDB). Penelitian ini menyimpulkan bahwa rendahnya angka putus sekolah saja tidak meningkatkan daya saing tenaga kerja tanpa diimbangi pendidikan yang berkualitas. Penelitian ini merekomendasikan Indonesia untuk mengalihkan fokus dari kuantitas ke kualitas, menyelaraskan kurikulum dengan industri, dan memperkuat pelatihan vokasi.

Kata Kunci: *angka putus sekolah, daya saing tenaga kerja, produktivitas, anggaran pendidikan, ASEAN*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi sebuah negara pada masa sekarang tidak lagi hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam, melainkan lebih fokus pada kualitas manusia atau yang biasa disebut sebagai modal manusia (*human capital*). Pendidikan formal merupakan jalan utama bagi setiap individu untuk mendapatkan keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan agar bisa bekerja secara produktif. Menurut Bangquiao (2025), investasi di bidang pendidikan adalah kunci pertumbuhan ekonomi jangka panjang; sehingga jika banyak anak yang putus sekolah, hal itu menjadi kerugian besar bagi negara karena hilangnya potensi sumber daya manusia yang berkualitas (Grace et al., 2025). Anak-anak yang tidak menyelesaikan sekolah cenderung sulit mendapatkan pekerjaan yang layak dan sering kali terpaksa bekerja di sektor informal dengan upah yang rendah. Kondisi ini secara tidak langsung akan meningkatkan angka pengangguran dan menambah beban anggaran pemerintah karena meningkatnya kebutuhan masyarakat akan bantuan sosial.

Di kawasan Asia Tenggara, negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand (ASEAN-4) saat ini sedang giat meningkatkan daya saing agar bisa menjadi negara maju. Namun, masalah angka putus sekolah masih menjadi tantangan yang cukup berat bagi keempat negara tersebut. Di Indonesia, masalah ekonomi sering menjadi alasan utama mengapa seorang anak harus berhenti sekolah. Diky Ramadhan dkk (2025) menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan membuat keluarga berpenghasilan rendah harus menghadapi pilihan sulit antara menyekolahkan anak atau menyuruh mereka bekerja demi mencukupi kebutuhan sehari-hari (Diky, dkk 2025). Krisis ekonomi memperparah situasi ini karena menyebabkan penurunan pendapatan keluarga secara drastis, sehingga banyak anak terpaksa putus sekolah untuk membantu perekonomian keluarga (Gustian, 2025). Perbedaan kebijakan dan kondisi ekonomi di ASEAN-4 membuat kualitas tenaga kerja di masing-masing negara juga berbeda. Malaysia misalnya, cenderung memiliki daya serap pendidikan yang lebih baik karena dukungan anggaran yang besar, sementara Indonesia masih terus berjuang mengatasi masalah kemiskinan agar akses pendidikan bisa lebih merata. Di Filipina, meskipun ada kebijakan kuliah gratis (*UAQTEA*), beban biaya hidup seperti tempat tinggal, transportasi, dan perlengkapan sekolah tetap menjadi alasan ekonomi utama mahasiswa putus kuliah, terutama di daerah pedesaan (Naz, 2024).

Masalah putus sekolah ini sebenarnya tidak hanya disebabkan oleh faktor kurangnya biaya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan kondisi mental si anak. Abdul Hakim (2019) menemukan bahwa latar belakang pendidikan orang tua dan kebutuhan ekonomi yang memaksa anak bekerja menjadi faktor kuat yang meningkatkan risiko putus sekolah (Abdul, 2019). Meskipun pemerintah telah mencoba memberikan solusi melalui bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), tantangan di lapangan tetaplah besar. Selain masalah ekonomi, ada juga sisi psikologis yang perlu diperhatikan. Anak yang putus sekolah biasanya memiliki kepercayaan diri dan kontrol diri yang lebih rendah dibandingkan mereka yang lulus sekolah. Hal

ini membuat mereka menjadi kurang tangguh saat harus bersaing di pasar kerja, sehingga tercipta kesenjangan antara kemampuan yang dimiliki tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri modern (Gustian, 2025).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dampak angka putus sekolah terhadap daya saing tenaga kerja di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand dengan menggunakan data dari World Bank dalam lima tahun terakhir. Penelitian ini akan melihat bagaimana tren pendidikan di empat negara tersebut memengaruhi produktivitas nasional dan seberapa banyak tenaga kerja yang mampu terserap di sektor profesional. Melalui studi komparatif ini, diharapkan kita bisa menemukan pola kebijakan yang efektif dari negara tetangga untuk kemudian diadaptasi di dalam negeri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah dalam merancang program pendidikan yang lebih tepat sasaran, sehingga kualitas tenaga kerja kita semakin meningkat dan pertumbuhan ekonomi nasional dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan.

Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*)

Konsep modal manusia merupakan pondasi utama dalam memahami hubungan antara investasi pendidikan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam perspektif ekonomi modern, manusia tidak hanya dipandang sebagai tenaga kerja fisik, tetapi sebagai aset yang nilai ekonominya dapat ditingkatkan melalui pendidikan. Menurut Bangquiao (2025), pendidikan formal memberikan nilai tambah berupa pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan kompetensi teknis yang menjadi penggerak utama produktivitas nasional (Grace et al., 2025). Stok pengetahuan yang terakumulasi dalam diri individu akan menentukan seberapa efisien sebuah negara dalam mengelola sumber dayanya.

Lebih lanjut, teori ini menekankan bahwa angka putus sekolah merupakan bentuk "investasi yang gagal" atau inefisiensi ekonomi. Individu yang gagal menyelesaikan pendidikan menengah akan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi kognitif mereka secara maksimal. Sebagaimana dijelaskan oleh Bangquiao (2025), hal ini berakibat pada terbatasnya pilihan karier saat mereka dewasa, di mana mereka cenderung terjebak dalam pekerjaan berketerampilan rendah (*low-skilled work*). Dalam skala nasional, jika proporsi penduduk yang putus sekolah cukup tinggi, maka daya saing negara tersebut di pasar global akan melemah karena kurangnya tenaga kerja yang adaptif terhadap inovasi dan teknologi (Grace et al., 2025).

Dampak Sosio-Ekonomi Putus Sekolah terhadap Pasar Kerja

Fenomena putus sekolah membawa dampak berantai yang tidak hanya merugikan individu secara pribadi, tetapi juga membebani sistem sosial dan ekonomi negara. Berdasarkan studi literatur dari Bangquiao (2025), terdapat korelasi langsung antara rendahnya tingkat pendidikan dengan tingginya angka pengangguran serta rendahnya tingkat pendapatan. Individu yang putus sekolah sering kali tidak memiliki kualifikasi formal yang dibutuhkan oleh sektor industri modern, sehingga mereka lebih banyak terserap ke sektor informal yang tidak memiliki kepastian upah maupun jaminan kesehatan (Grace et al., 2025). Penelitian di Filipina oleh Graham M. Naz (2024) menemukan bahwa selain faktor finansial, faktor personal seperti kehamilan tidak diinginkan dan konflik keluarga juga menjadi penyebab signifikan mahasiswa putus kuliah, yang kemudian mempersempit peluang mereka di pasar kerja (Naz, 2024).

Secara makro, kondisi ini menciptakan beban fiskal bagi pemerintah. Angka putus sekolah yang tinggi meningkatkan jumlah penduduk rentan yang membutuhkan bantuan sosial dan subsidi dari negara. Selain itu, Bangquiao (2025) juga menyoroti bahwa penurunan kompetensi angkatan kerja akibat pengabaian pendidikan secara langsung akan menurunkan *output* ekonomi nasional (Grace et al., 2025). Dengan kata lain, setiap satu anak yang putus sekolah mewakili hilangnya potensi kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara di masa depan. Oleh karena itu, menekan angka putus sekolah adalah strategi wajib untuk menjaga kestabilan pasar kerja.

Ketimpangan Ekonomi dan Kemiskinan sebagai Faktor Determinan

Masalah ekonomi tetap menjadi akar permasalahan utama dari tingginya angka putus sekolah di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Diky Ramadhan dkk (2025) mengungkapkan bahwa ketimpangan ekonomi antar kelompok masyarakat menciptakan jurang pemisah dalam akses pendidikan yang berkualitas (Diky, dkk 2025). Keluarga yang berada di garis kemiskinan sering kali harus menghadapi dilema antara membiayai sekolah anak atau memenuhi kebutuhan pokok harian. Ketidakmampuan finansial ini membuat pendidikan dianggap sebagai beban biaya tambahan daripada sebuah investasi masa depan.

Studi di Malaysia oleh Muhammad Sukri Bin Ramli (2025) menunjukkan bahwa terdapat disparitas yang signifikan antar negara bagian: wilayah dengan pendapatan rumah tangga rendah cenderung memiliki tingkat penyelesaian sekolah yang lebih rendah, meskipun ada pengecualian seperti Kelantan yang berhasil mencapai tingkat penyelesaian tinggi meskipun pendapatan rendah karena dukungan komunitas yang kuat (Sukri & Ramli, 2025). Kondisi kemiskinan ini juga memicu munculnya fenomena pekerja anak, tingkat kemiskinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keterlibatan anak dalam dunia kerja. Ketika pendapatan keluarga tidak mencukupi, anak-anak sering kali terpaksa berhenti sekolah untuk membantu mencari nafkah. Hal ini diperkuat oleh temuan Mujiati dkk (2018) yang menyatakan bahwa keterbatasan ekonomi keluarga merupakan faktor utama orang tua tidak dapat melanjutkan pendidikan anak-anak mereka (AshariP & Muhammadiyah Kendari mujiati, 2018). Tanpa intervensi finansial yang tepat, lingkaran setan kemiskinan ini akan terus berlanjut karena anak yang putus sekolah hari ini kemungkinan besar akan menjadi tenaga kerja berupah rendah di masa depan.

Tinjauan Psikologis: Konsep Diri dan Kontrol Diri Anak Putus Sekolah

Selain faktor eksternal seperti ekonomi, aspek internal atau psikologis dari anak juga sangat menentukan keberlanjutan pendidikan. Kepribadian dan kondisi psikologis merupakan fondasi dari perilaku individu, termasuk keputusan untuk tetap sekolah atau berhenti (Gustian, 2025.). Fokus utama dalam hal ini adalah *locus of control* (pusat kendali diri) dan konsep diri. Anak-anak yang memiliki konsep diri yang positif cenderung lebih tangguh dalam menghadapi tantangan di sekolah, sementara mereka yang putus sekolah sering kali memiliki persepsi negatif terhadap kemampuan diri mereka sendiri.

Studi psikologis menunjukkan bahwa anak yang putus sekolah sering kali merasa tidak memiliki kendali atas masa depan mereka (*eksternal locus of control*). Mereka merasa bahwa kesuksesan hanya ditentukan oleh nasib atau lingkungan, bukan oleh usaha dan pendidikan. Lemahnya kontrol diri ini membuat anak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan belajar atau tekanan ekonomi. Dampaknya, ketika mereka masuk ke dunia kerja, mereka sering kali kurang memiliki motivasi berprestasi dan kedisiplinan yang dibutuhkan oleh dunia profesional, yang pada akhirnya semakin memperburuk posisi mereka dalam persaingan tenaga kerja (Gustian, 2025).

Kebijakan Intervensi dan Strategi Pemberdayaan di Indonesia

Untuk memutus rantai putus sekolah, peran kebijakan pemerintah melalui bantuan sosial pendidikan menjadi sangat krusial. Abdul Hakim (2019) melalui penelitiannya menyebutkan bahwa kepemilikan program bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Program Indonesia Pintar (PIP) adalah variabel paling dominan dalam menekan angka putus sekolah (Bps & Aceh, n.d.). Bantuan ini berfungsi sebagai jaring pengaman yang mengurangi biaya peluang (*opportunity cost*) bagi keluarga miskin, sehingga anak-anak mereka tetap dapat mengakses bangku pendidikan menengah.

Namun, bagi remaja yang sudah terlanjur putus sekolah, diperlukan strategi pemberdayaan agar mereka tetap memiliki daya saing. Lilis Irmawatie (2012) menyarankan pentingnya pelatihan keterampilan kerja (*vocational training*) bagi remaja putus sekolah. Pelatihan seperti mekanik motor, elektronika, atau keterampilan teknis lainnya dapat menumbuhkan sikap kemandirian dan meningkatkan rasa percaya diri mereka (Irmawatie et al., 2012). Dengan adanya pembinaan yang tepat, remaja putus sekolah dapat memiliki kinerja tinggi dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga mereka tidak lagi dipandang sebagai beban sosial melainkan sebagai bagian dari tenaga kerja produktif yang mandiri.

Selain itu, pendekatan yang lebih holistik juga diperlukan. Faisal Faliyandra (2025) menekankan pentingnya pendidikan partisipatif yang melibatkan harapan orang tua petani tradisional untuk mencegah anak putus sekolah di daerah pedesaan (Faliyandra et al., 2025). Pendekatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas lokal sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat setempat.

Aspek kesehatan juga tidak dapat dipisahkan dari daya saing tenaga kerja. Dwidjo Susilo dkk (2024) dalam penelitiannya tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia mengungkap bahwa masih terdapat kesenjangan akses layanan kesehatan antar daerah, beban premi bagi pekerja sektor informal, dan defisit pembiayaan yang besar. Kondisi ini dapat memperburuk kerentanan keluarga miskin, karena pengeluaran kesehatan yang tidak terduga dapat mengalihkan dana pendidikan anak, sementara akses kesehatan yang buruk dapat menyebabkan masalah kesehatan yang berujung pada putus sekolah (Susilo et al., 2025). Di sisi lain, Rahmad Budi Suharto (2025) menemukan bahwa belanja kesehatan memiliki efek negatif signifikan terhadap angka putus sekolah, yang mengindikasikan bahwa peningkatan akses layanan kesehatan dapat mengurangi angka putus sekolah dengan mengatasi hambatan kesehatan yang menghalangi kehadiran di sekolah (Budi Suharto et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak bisa berdiri sendiri; kesehatan dan ekonomi keluarga juga merupakan faktor integral yang mempengaruhi keberlanjutan pendidikan anak.

Peter Brummund dan Michael D. Makowsky (2024) juga memberikan perspektif menarik tentang bagaimana ikatan sosial lokal, seperti partisipasi dalam kelompok keagamaan minoritas atau tabungan putar (*arisan*), dapat mengurangi mobilitas tenaga kerja. Hal ini pada akhirnya memberikan kekuatan monopsoni kepada pemberi kerja untuk menekan upah, yang secara tidak langsung memperkuat siklus kemiskinan dan memperburuk dampak putus sekolah terhadap daya saing tenaga kerja (Brummund & Makowsky, 2026).

METODE PENELITIAN

Strategi dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif komparatif. Penggunaan metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik populasi secara akurat, serta membandingkan fenomena angka putus sekolah di empat negara berbeda, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand (ASEAN-4). Desain komparatif ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan dalam kebijakan pendidikan dan kualitas tenaga kerja antar negara yang memiliki karakteristik ekonomi serupa di kawasan Asia Tenggara. Dengan menganalisis perbedaan-perbedaan tersebut, penelitian ini dapat menarik benang merah mengenai efektivitas sistem pendidikan dalam mendukung produktivitas ekonomi nasional.

Ruang Lingkup Lokasi dan Waktu

Lokasi penelitian difokuskan pada kawasan regional ASEAN-4 yang mencakup Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Keempat negara ini dipilih sebagai objek studi karena merupakan kekuatan ekonomi utama di Asia Tenggara yang

sedang menghadapi tantangan serupa, yaitu pemanfaatan bonus demografi. Adapun periode waktu penelitian yang ditetapkan adalah selama lima tahun, terhitung dari tahun 2019 hingga 2023. Pemilihan rentang waktu ini sangat krusial karena mencakup fase sebelum, selama, dan sesudah pandemi COVID-19, sehingga peneliti dapat melihat ketahanan (*resilience*) sistem pendidikan masing-masing negara terhadap guncangan ekonomi global yang berdampak pada angka putus sekolah

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan

Data yang diolah dalam studi ini sepenuhnya berasal dari sumber sekunder yang kredibel, yaitu World Bank Open Data. Data sekunder dipilih karena menyediakan basis data statistik yang telah divalidasi dan disinkronisasi antar negara, sehingga meminimalisir risiko bias perbedaan standar pengukuran. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi elektronik (*data mining*) dengan mencari indikator-indikator spesifik menggunakan kode indikator internasional (seperti *SE.SEC.CMPT.ZS* untuk tingkat penyelesaian sekolah dan *NY.GDP.PC.AP.PP.CD* untuk produktivitas). File data yang diunduh kemudian diseleksi (*data cleaning*) untuk memastikan tidak ada data yang hilang (*missing values*) pada tahun-tahun pengamatan kunci.

Definisi Operasional Variabel

Agar analisis lebih terarah, peneliti menetapkan batasan operasional untuk variabel-variabel yang digunakan:

1. Angka Putus Sekolah: Diukur menggunakan indikator *Lower Secondary Completion Rate* (Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menengah Pertama). Secara operasional, rendahnya angka penyelesaian ini merepresentasikan tingginya angka putus sekolah pada usia produktif awal.
2. Daya Saing Tenaga Kerja: Diukur melalui *GDP per person employed (PPP)*. Variabel ini menunjukkan seberapa besar nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh rata-rata satu orang pekerja. Semakin tinggi angka ini, semakin kompetitif tenaga kerja di negara tersebut.
3. Variabel Pendukung: Mencakup *Government Expenditure on Education* (Anggaran Pendidikan) untuk melihat sejauh mana intervensi fiskal pemerintah mampu menekan risiko putus sekolah.

Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama:

1. Analisis Tren: Peneliti menyusun data secara berkala (*time-series*) untuk melihat apakah angka putus sekolah mengalami kenaikan atau penurunan selama periode 2019-2023.
2. Analisis Komparatif: Data antar negara disandingkan dalam bentuk tabel dan grafik untuk menemukan perbandingan mencolok. Misalnya, membandingkan produktivitas Malaysia dengan Indonesia dalam hubungannya dengan tingkat penyelesaian pendidikan masing-masing.
3. Analisis Hubungan Teoritis: Temuan statistik kemudian dikonfirmasi dengan literatur pendukung seperti teori modal manusia dari Bangquiao (2025) dan faktor ekonomi dari Diky Ramadhan (2025). Interpretasi dilakukan secara naratif untuk menjawab apakah penurunan angka putus sekolah benar-benar berdampak langsung pada penguatan daya saing tenaga kerja nasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinamika Angka Putus Sekolah di Kawasan ASEAN-4 (2019-2023)

Berdasarkan data primer yang diolah dari database World Bank, indikator *Lower Secondary Completion Rate* (tingkat penyelesaian pendidikan menengah pertama) memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas sistem pendidikan dalam mempertahankan siswa hingga lulus. Indikator ini dipilih karena merepresentasikan kebalikan dari angka putus sekolah: semakin tinggi tingkat penyelesaian, semakin rendah angka putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama.

Lower Secondary Completion Rate					
Negara	2019	2020	2021	2022	2023
Indonesia	100,9844144	99,2865225	98,33000366	100,6854792	97,65151052
Malaysia	73,90092485	75,15327754	79,52985392	79,44333814	81,82154675
Filipina	79,40442384	81,78897553	85,79141154	97,36187449	92,27235461
Thailand	85,65306596	87,78733266	89,38231747	91,43323929	96,43156537

Tabel 1. Lower Secondary Completion Rate di ASEAN-4 (2019–2023)

Sumber : World Bank (2026) diolah kembali

Tabel 1 menunjukkan bahwa Indonesia secara konsisten memiliki tingkat penyelesaian pendidikan menengah pertama tertinggi di antara keempat negara ASEAN yang diteliti, dengan rata-rata mencapai 99,39 persen selama periode lima tahun. Bahkan pada tahun 2019 dan 2022, angka penyelesaian Indonesia melampaui 100 persen, tepatnya 100,98 persen dan 100,68 persen. Fenomena angka di atas 100 persen ini bukanlah kesalahan data, melainkan mengindikasikan bahwa jumlah siswa yang menyelesaikan pendidikan menengah pertama pada suatu tahun angkatan (cohort) bisa melebihi jumlah penduduk pada usia standar (biasanya 14-15 tahun). Hal ini dapat terjadi karena adanya siswa yang lebih tua (over-age students) yang kembali mengikuti ujian penyelesaian atau program paket kesetaraan. Secara substantif, capaian ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif, Indonesia hampir berhasil menghilangkan masalah putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah pertama. Hanya sekitar 2-3 persen anak pada setiap angkatan yang tidak berhasil menyelesaikan jenjang ini.

Namun demikian, perlu dicermati bahwa terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 97,65 persen. Penurunan ini mungkin terkait dengan dampak lanjutan dari pandemi COVID-19 yang mengganggu proses belajar mengajar secara langsung, serta meningkatnya tekanan ekonomi yang memaksa beberapa keluarga untuk menyuruh anaknya bekerja daripada menyelesaikan sekolah. Meskipun demikian, angka 97,65 persen tetap tergolong sangat tinggi dalam konteks negara berkembang.

Sementara itu, Malaysia menempati posisi terendah dengan rata-rata hanya 77,97 persen. Angka ini berarti bahwa sekitar 22 dari 100 anak usia sekolah menengah pertama di Malaysia tidak menyelesaikan pendidikannya. Yang menarik, Malaysia justru menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun: dari 73,90 persen pada 2019 menjadi 81,82 persen pada 2023. Peningkatan sebesar hampir 8 poin persentase dalam lima tahun ini patut diapresiasi, namun Malaysia masih tertinggal jauh dibandingkan Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Malaysia memiliki anggaran pendidikan yang besar (akan dibahas pada Tabel 3), tantangan internal seperti kesenjangan antar wilayah (misalnya antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak) atau tingginya biaya tidak langsung pendidikan masih menjadi hambatan signifikan.

Filipina menunjukkan lonjakan yang sangat dramatis pada tahun 2022, yaitu melompat dari 85,79 persen (2021) menjadi 97,36 persen (2022). Kenaikan hampir 12 persen dalam satu tahun ini sangat tidak biasa dan perlu dicermati. Kemungkinan penjelasannya adalah adanya perubahan kebijakan pencatatan statistik, atau keberhasilan program intervensi besar-besaran pasca-pandemi seperti *basic education recovery plan*. Namun, angka tersebut sedikit turun menjadi 92,27 persen pada 2023, yang masih tergolong tinggi. Secara rata-rata, Filipina berada di urutan ketiga dengan 87,32 persen.

Thailand menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan menggembirakan, dari 85,65 persen (2019) menjadi 96,43 persen (2023). Ini adalah peningkatan sekitar 10,8 poin persentase dalam lima tahun. Thailand berhasil menyalip Filipina pada tahun 2023 dan mendekati capaian Indonesia. Rata-rata Thailand selama periode penelitian adalah 90,14 persen, menempatkannya di posisi kedua setelah Indonesia.

Perbandingan Daya Saing Tenaga Kerja (GDP per Person Employed)

Untuk mengukur daya saing tenaga kerja, penelitian ini menggunakan indikator *GDP per person employed (PPP)* atau Produk Domestik Bruto per orang yang bekerja berdasarkan paritas daya beli. Indikator ini menunjukkan seberapa besar nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh rata-rata satu orang pekerja dalam satu tahun. Semakin tinggi angka ini, semakin produktif dan kompetitif tenaga kerja di negara tersebut. **Tabel 2** menyajikan data produktivitas tenaga kerja keempat negara selama periode 2019-2023.

GDP per person employed (constant 2021 PPP \$)					
Negara	2019	2020	2021	2022	2023
Indonesia	26237,97265	25884,27877	27058,28349	27580,80215	28184,30351
Malaysia	65082,78763	61442,14815	62214,03069	65445,33284	66453,95054
Filipina	23665,95802	22857,16773	23200,71389	22362,27187	23081,71799
Thailand	38366,15696	35914,62079	36345,69133	36892,93275	37074,51836

Tabel 2. GDP per Person Employed (constant 2021 PPP \$) di ASEAN-4 (2019–2023)

Sumber : World Bank (2026) diolah kembali

Tabel 2 menunjukkan disparitas yang sangat mencolok antar negara. Malaysia berada di posisi teratas dengan rata-rata produktivitas tenaga kerja mencapai USD 64.128 per orang per tahun (dalam PPP konstan 2021). Angka ini hampir 2,4 kali lipat dari Thailand (USD 36.919) dan sekitar 2,4 kali lipat dari Indonesia (USD 26.989). Bahkan, produktivitas tenaga kerja Malaysia hampir tiga kali lipat dari Filipina yang hanya USD 23.034.

Mari kita bedah lebih dalam. Pada tahun 2019, sebelum pandemi melanda, produktivitas Malaysia sudah sangat tinggi di USD 65.083. Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan tajam pada tahun 2020 menjadi USD 61.442 (turun sekitar 5,6 persen), yang mencerminkan dampak lockdown dan gangguan rantai pasok. Namun, Malaysia pulih dengan cepat: pada tahun

2022 produktivitasnya kembali melampaui level pra-pandemi (USD 65.445) dan terus meningkat menjadi USD 66.454 pada 2023. Hal ini menunjukkan resiliensi ekonomi Malaysia yang didukung oleh struktur industri yang berbasis manufaktur bernilai tambah tinggi dan jasa modern.

Thailand menempati posisi kedua dengan produktivitas rata-rata USD 36.919. Mirip dengan Malaysia, Thailand juga mengalami penurunan akibat pandemi, dari USD 38.366 (2019) menjadi USD 35.915 (2020), tetapi kemudian pulih secara bertahap hingga USD 37.075 pada 2023. Meskipun belum sepenuhnya kembali ke level 2019, tren pemulihan positif terlihat. Produktivitas tenaga kerja Thailand sekitar 57 persen dari Malaysia, tetapi masih jauh di atas Indonesia.

Indonesia, meskipun memiliki tingkat penyelesaian pendidikan tertinggi (Tabel 1), hanya berada di peringkat ketiga dalam hal produktivitas tenaga kerja. Rata-rata produktivitas Indonesia adalah USD 26.989. Jika dibandingkan dengan Thailand, produktivitas Indonesia hanya sekitar 73 persen dari Thailand. Lebih memprihatinkan lagi, produktivitas Indonesia hanya sekitar 42 persen dari Malaysia. Artinya, setiap tenaga kerja di Malaysia menghasilkan nilai tambah lebih dari dua kali lipat dibandingkan tenaga kerja Indonesia. Pandemi juga berdampak pada Indonesia: produktivitas turun dari USD 26.238 (2019) menjadi USD 25.884 (2020). Namun, Indonesia menunjukkan pemulihan yang stabil hingga mencapai USD 28.184 pada 2023, yang merupakan level tertinggi selama periode pengamatan. Meskipun meningkat, jarak dengan Malaysia justru melebar karena Malaysia pulih lebih cepat.

Filipina menjadi negara dengan produktivitas tenaga kerja terendah, rata-rata hanya USD 23.034. Bahkan, produktivitas Filipina cenderung stagnan dan sedikit fluktuatif: dari USD 23.666 (2019) turun menjadi USD 22.857 (2020), sempat naik tipis menjadi USD 23.201 (2021), kemudian turun lagi menjadi USD 22.362 (2022), dan baru pulih menjadi USD 23.082 (2023). Pada tahun 2023, produktivitas Filipina masih lebih rendah dibandingkan tahun 2019, menandakan pemulihan yang lambat.

Perbandingan silang antara Tabel 1 dan Tabel 2 menghasilkan temuan yang sangat penting untuk penelitian ini. Indonesia, dengan angka penyelesaian sekolah tertinggi (99,39 persen), seharusnya memiliki tenaga kerja yang terdidik dengan baik. Namun, produktivitasnya justru kalah jauh dari Thailand yang angka penyelesaiannya lebih rendah (90,14 persen) dan Malaysia yang angka penyelesaiannya paling rendah (77,97 persen). Fakta ini secara tegas membantah asumsi sederhana bahwa menekan angka putus sekolah otomatis meningkatkan daya saing tenaga kerja. Ada faktor lain yang lebih menentukan, yaitu kualitas pendidikan dan relevansinya dengan kebutuhan industri.

Dengan kata lain, Malaysia membuktikan bahwa meskipun banyak anak yang tidak menyelesaikan pendidikan menengah pertama (sekitar 22 persen), mereka yang lulus dan masuk ke pasar kerja memiliki produktivitas yang sangat tinggi. Ini mengindikasikan bahwa sistem pendidikan Malaysia, terutama pada jenjang menengah atas dan vokasi, mampu menghasilkan lulusan yang siap pakai. Sementara itu, Indonesia berhasil membuat hampir semua anak menyelesaikan sekolah, tetapi isi dari pendidikan tersebut mungkin belum cukup membekali keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja modern. Hipotesis ini akan diperkuat dengan melihat alokasi anggaran pendidikan pada Tabel 3.

Analisis Hubungan Anggaran Pendidikan dengan Angka Putus Sekolah dan Daya Saing

Untuk memahami mengapa terjadi ketimpangan antara capaian pendidikan (kuantitas) dan produktivitas (kualitas), penting untuk menganalisis input kebijakan yang paling mendasar, yaitu anggaran pendidikan. **Tabel 3** menyajikan alokasi belanja pemerintah untuk pendidikan sebagai persentase terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masing-masing negara.

Government Expenditure on Education (% of GDP)					
Negara	2019	2020	2021	2022	2023
Indonesia	0,964399078	1,015932213	1,032217507	0,86394335	1,275170882
Malaysia	4,157760143	3,911760092	4,261093934	3,49933782	3,514800072
Filipina	3,407486491	3,858290513	3,872497548	3,579600895	3,623686347
Thailand	3,022214112	3,153141717	2,982124285	2,611870228	2,521222196

Tabel 3. Government Expenditure on Education (% of GDP) di ASEAN-4 (2019–2023)

Sumber: World Bank (2026) diolah kembali

Tabel 3 mengungkap fakta yang sangat mengejutkan sekaligus kontradiktif. Indonesia mengalokasikan anggaran pendidikan paling kecil di antara keempat negara, dengan rata-rata hanya 1,03 persen dari PDB. Angka ini bahkan cenderung fluktuatif: sempat naik menjadi 1,03 persen pada 2021, turun drastis menjadi 0,86 persen pada 2022 (terendah dalam periode), lalu melonjak menjadi 1,28 persen pada 2023. Rata-rata 1,03 persen ini sangat jauh di bawah rekomendasi UNESCO yang menargetkan minimal 4-6 persen dari PDB untuk negara berkembang. Bahkan jika dibandingkan dengan rata-rata ASEAN-4 (tanpa Indonesia) sekitar 3,47 persen, anggaran pendidikan Indonesia hanya sepertiga dari tetangga-tetangganya.

Sebaliknya, Malaysia menjadi negara dengan alokasi anggaran pendidikan tertinggi, rata-rata 3,87 persen dari PDB, mendekati rekomendasi UNESCO. Meskipun sempat turun pada 2020 (3,91 persen) dan 2022-2023 (sekitar 3,5 persen), secara konsisten Malaysia selalu berada di atas 3,5 persen. Filipina berada di posisi kedua dengan rata-rata 3,67 persen, bahkan sempat mencapai 3,87 persen pada 2021. Thailand, meskipun lebih rendah dari Malaysia dan Filipina, tetap memiliki rata-rata 2,86 persen, hampir tiga kali lipat dari Indonesia.

Analisis Tambahan: Partisipasi Sekolah, Partisipasi Angkatan Kerja, dan Pendapatan per Kapita

Untuk melengkapi gambaran tentang daya saing tenaga kerja, penelitian ini juga menganalisis tiga indikator pendukung: School Enrollment (Secondary) yaitu angka partisipasi sekolah menengah (kasar), Labor Force Participation Rate (LFPR) yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk usia 15 tahun ke atas, serta GDP per capita sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat secara umum. Ketiga indikator ini membantu menjelaskan mengapa angka putus sekolah yang rendah belum tentu meningkatkan daya saing tenaga kerja.

A. Angka Partisipasi Sekolah Menengah (*School Enrollment, Secondary*)

Data ini berbeda dengan Lower Secondary Completion Rate. Jika *completion rate* mengukur persentase penduduk yang berhasil menyelesaikan jenjang tertentu, maka enrollment mengukur persentase anak usia sekolah yang *sedang terdaftar aktif* di sekolah menengah (tanpa melihat apakah mereka nanti lulus atau tidak).

School Enrollment, Secondary (% gross/net)					
Negara	2019	2020	2021	2022	2023
Indonesia	94,94670449	96,93457791	97,84414798	97,81676027	96,00021203
Malaysia	75,32298279	73,24594116	74,96181811	78,83419863	79,44727887
Filipina	85,3821866	87,94198795	85,86664756	92,29127118	91,54934246
Thailand	81,72064259	82,3668561	84,66445282	88,06616869	93,33563153

Tabel 4. School Enrollment, Secondary (% gross) di ASEAN-4 (2019–2023)

Sumber : World Bank (2026) diolah kembali

Tabel 4 menunjukkan bahwa Indonesia kembali unggul dalam hal partisipasi sekolah menengah, dengan rata-rata 96,71 persen. Angka ini bahkan lebih tinggi dari tingkat penyelesaian (Tabel 1), yang mengindikasikan bahwa hampir semua anak usia sekolah menengah di Indonesia terdaftar di sekolah, meskipun sekitar 3 persen di antaranya tidak berhasil menyelesaikan. Pandemi sempat menyebabkan sedikit fluktuasi, namun secara umum partisipasi Indonesia stabil di atas 94 persen.

Malaysia memiliki partisipasi terendah (rata-rata 76,36%), konsisten dengan rendahnya tingkat penyelesaian. Menariknya, Filipina dan Thailand menunjukkan peningkatan partisipasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Thailand, misalnya, melompat dari 81,72 persen (2019) menjadi 93,34 persen (2023), naik hampir 12 poin. Ini mengindikasikan adanya kebijakan akselerasi pasca-pandemi.

Korelasi dengan daya saing: Partisipasi sekolah yang tinggi (seperti Indonesia) adalah modal awal yang baik, tetapi tidak cukup. Malaysia yang partisipasinya rendah justru memiliki tenaga kerja paling produktif. Hal ini menegaskan bahwa kualitas proses belajar lebih penting daripada sekadar kehadiran di sekolah.

B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (*Labor Force Participation Rate*)

Indikator ini mengukur seberapa besar proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif bekerja atau sedang mencari kerja. Tingkat partisipasi yang tinggi bisa berarti dua hal: (1) banyak orang yang produktif secara ekonomi, atau (2) banyak orang yang terpaksa bekerja karena tekanan ekonomi (termasuk pekerja anak atau pekerja informal). **Tabel 5** menyajikan data LFPR.

Labor force participation rate, total (% of total population ages 15+) (modeled ILO estimate)					
Negara	2019	2020	2021	2022	2023
Indonesia	68,238	67,401	65,868	67,018	67,899
Malaysia	65,871	65,473	65,619	66,223	66,178
Filipina	59,444	54,746	56,471	61,439	61,42

Thailand	66,94	67,021	66,952	67,18	67,814
----------	-------	--------	--------	-------	--------

Tabel 5. Labor Force Participation Rate, total (% of population ages 15+) di ASEAN-4 (2019–2023)

Sumber : World Bank (2026) diolah kembali

Tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di keempat negara relatif stabil di kisaran 58–68 persen. Indonesia dan Thailand memiliki rata-rata tertinggi (masing-masing 67,29% dan 67,18%), disusul Malaysia (65,87%), dan Filipina terendah (58,70%). Pandemi COVID-19 menekan partisipasi di semua negara pada 2020-2021, terutama di Filipina yang turun drastis dari 59,44% (2019) menjadi 54,75% (2020) karena lockdown ketat. Namun, semua negara pulih pada 2022-2023.

Yang menarik, meskipun Indonesia memiliki angka putus sekolah terendah dan partisipasi sekolah tertinggi, tingkat partisipasi angkatan kerjanya tidak berbeda signifikan dengan Thailand dan Malaysia. Artinya, keberhasilan pendidikan tidak serta merta mendorong lebih banyak orang masuk ke pasar kerja. Sebaliknya, Malaysia dengan angka putus sekolah tertinggi justru mampu mempertahankan LFPR di atas 65 persen, dan produktivitas per pekerja sangat tinggi (Tabel 2). Ini menunjukkan bahwa angkatan kerja Malaysia lebih terseleksi dan terampil, sehingga meskipun jumlahnya lebih sedikit (secara proporsi), output ekonominya besar.

Filipina memiliki LFPR terendah, yang mengindikasikan bahwa banyak penduduk usia produktif (terutama perempuan) tidak aktif secara ekonomi. Hal ini menjadi salah satu penyebab rendahnya produktivitas agregat Filipina.

C. Pendapatan per Kapita (GDP per Capita)

GDP per kapita (dalam dolar AS saat ini) mencerminkan tingkat kesejahteraan rata-rata penduduk. Indikator ini berkaitan erat dengan daya saing tenaga kerja karena negara dengan tenaga kerja produktif cenderung memiliki pendapatan per kapita yang tinggi.

Negara	GDP per capita (current US\$)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indonesia	4106,948562	3853,702888	4287,17314	4730,834848	4876,307745
Malaysia	10920,19176	9957,526267	10903,10375	11754,56783	11386,03956
Filipina	3400,789498	3227,579102	3484,385939	3548,069306	3804,082741
Thailand	7605,696578	6985,643939	7057,207548	6909,352818	7195,101309

Tabel 6. GDP per Capita (current US\$) di ASEAN-4 (2019–2023)

Sumber : World Bank (2026) diolah kembali

Tabel 6 mempertegas ketimpangan ekonomi di kawasan ASEAN-4. Malaysia memiliki pendapatan per kapita tertinggi, rata-rata USD 10.984, hampir 2,5 kali lipat Indonesia (USD 4.371) dan lebih dari 3 kali lipat Filipina (USD 3.493). Thailand berada di posisi kedua dengan rata-rata USD 7.151. Indonesia meskipun memiliki angka putus sekolah terendah, pendapatan per kapitanya hanya sekitar 40 persen dari Malaysia. Bahkan, pendapatan per kapita Indonesia masih di bawah Thailand.

Pandemi menyebabkan penurunan tajam pada 2020 di semua negara, terutama Malaysia (dari USD 10.920 menjadi USD 9.958) dan Thailand (dari USD 7.606 menjadi USD 6.986). Namun, Malaysia pulih paling cepat dan pada 2022 sudah melampaui level pra-pandemi. Indonesia juga pulih secara bertahap, mencapai USD 4.876 pada 2023, level tertinggi sepanjang periode. Filipina masih menjadi negara termiskin di antara keempat negara.

Korelasi dengan pendidikan dan tenaga kerja: Data ini memperkuat kesimpulan sebelumnya bahwa tingginya angka partisipasi dan penyelesaian sekolah di Indonesia tidak berkorelasi positif dengan pendapatan per kapita. Sebaliknya, Malaysia yang secara kuantitatif pendidikan formalnya lebih rendah justru menikmati pendapatan per kapita tertinggi. Penjelasan kembali pada kualitas dan relevansi pendidikan. Lulusan sekolah di Malaysia lebih siap pakai, sehingga mereka berkontribusi pada sektor bernilai tambah tinggi (manufaktur, jasa modern, teknologi). Lulusan sekolah di Indonesia, meskipun jumlahnya banyak, sebagian besar terserap ke sektor informal atau pekerjaan berupah rendah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komparatif terhadap data World Bank periode 2019–2023 untuk keempat negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand), penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Indonesia dalam menekan angka putus sekolah dan meningkatkan partisipasi sekolah menengah tidak serta merta diikuti oleh peningkatan daya saing tenaga kerja. Indonesia justru memiliki tingkat penyelesaian pendidikan menengah pertama tertinggi di kawasan, mencapai

rata-rata 99,39 persen, serta angka partisipasi sekolah menengah tertinggi pula, yaitu 96,71 persen. Namun, capaian kuantitatif yang mengesankan ini ternyata tidak berbanding lurus dengan produktivitas tenaga kerja yang diukur melalui GDP per person employed. Rata-rata produktivitas tenaga kerja Indonesia hanya sekitar USD 26.989, jauh di bawah Malaysia yang mencapai USD 64.128 dan Thailand yang mencapai USD 36.919, bahkan hanya sedikit di atas Filipina yang merupakan negara dengan kinerja terendah. Dengan kata lain, meskipun hampir semua anak Indonesia menyelesaikan pendidikan menengah pertama, setiap tenaga kerja di Indonesia hanya menghasilkan nilai tambah sekitar 42 persen dari tenaga kerja Malaysia dan 73 persen dari tenaga kerja Thailand. Temuan ini secara tegas membantah asumsi sederhana bahwa rendahnya angka putus sekolah otomatis meningkatkan daya saing tenaga kerja.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan adanya ketimpangan struktural atau *decoupling* antara indikator kuantitas pendidikan dan indikator kualitas produktivitas. Indonesia berada pada peringkat pertama untuk tingkat penyelesaian dan partisipasi sekolah, tetapi hanya pada peringkat ketiga untuk produktivitas tenaga kerja dan pendapatan per kapita. Sebaliknya, Malaysia yang justru memiliki peringkat terendah dalam hal penyelesaian dan partisipasi sekolah, mampu meraih peringkat pertama dalam produktivitas tenaga kerja dan pendapatan per kapita. Thailand menunjukkan kinerja yang paling seimbang dengan posisi menengah di hampir semua indikator, sementara Filipina secara konsisten berada di posisi terbawah meskipun anggaran pendidikannya cukup besar. Pola ini mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan, relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri, serta efektivitas belanja pendidikan jauh lebih menentukan daya saing tenaga kerja dibandingkan sekadar angka partisipasi atau kelulusan.

Dalam kaitannya dengan anggaran pendidikan, penelitian ini mengungkap fakta yang kontradiktif namun sangat penting. Indonesia mengalokasikan anggaran pendidikan paling kecil di antara keempat negara, rata-rata hanya 1,03 persen dari PDB, sementara Malaysia mengalokasikan paling besar (3,87 persen). Ironisnya, dengan anggaran yang sangat terbatas, Indonesia justru mampu mencapai angka penyelesaian dan partisipasi sekolah tertinggi, yang menunjukkan efisiensi program bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar dalam perluasan akses. Namun, anggaran yang rendah ini sekaligus menjadi penghambat utama dalam peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan pendidikan vokasi, pelatihan guru, serta penyediaan sarana prasarana yang memadai. Akibatnya, lulusan sekolah di Indonesia meskipun banyak jumlahnya, tidak memiliki kompetensi teknis dan non-teknis yang cukup untuk bersaing di pasar kerja regional. Sebaliknya, Malaysia dengan anggaran besar mampu berinvestasi pada hal-hal yang secara langsung meningkatkan produktivitas tenaga kerja, seperti kurikulum berbasis kompetensi, kemitraan industri, dan pelatihan vokasi yang terintegrasi. Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja (LFPR) Indonesia dan Thailand relatif sama tinggi sekitar 67 persen, namun produktivitas Thailand jauh lebih baik, yang menegaskan bahwa memiliki banyak pekerja tidaklah berarti jika kualitas per pekerja rendah.

Dengan demikian, kesimpulan utama penelitian ini adalah bahwa menekan angka putus sekolah hanyalah langkah awal yang tidak cukup untuk memenangkan persaingan tenaga kerja. Keberhasilan kuantitatif Indonesia di bidang pendidikan selama ini perlu diapresiasi, tetapi tanpa diiringi oleh peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan secara sistemik, bonus demografi yang diharapkan justru akan berubah menjadi beban sosial-ekonomi. Daya saing tenaga kerja Indonesia akan terus tertinggal dari Malaysia dan Thailand jika pemerintah masih berpuas diri dengan rendahnya angka putus sekolah tanpa melakukan reformasi mendasar pada kurikulum, penguatan pendidikan vokasi, peningkatan kompetensi guru, serta peningkatan anggaran pendidikan yang signifikan dan tepat sasaran.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini menawarkan beberapa rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Indonesia dalam merancang program pendidikan yang lebih berorientasi pada peningkatan daya saing tenaga kerja. Pertama, pemerintah perlu menggeser fokus kebijakan pendidikan dari sekadar menekan angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi, menuju peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Target nasional sebaiknya tidak lagi hanya berupa indikator kuantitatif seperti Angka Partisipasi Kasar atau Angka Penyelesaian, tetapi juga indikator kompetensi lulusan, tingkat serapan tenaga kerja di sektor formal, serta kepuasan pengguna lulusan (dunia usaha dan industri). Kedua, alokasi anggaran pendidikan harus ditingkatkan secara bertahap hingga setidaknya mendekati rata-rata ASEAN-4 yaitu sekitar 3 persen dari PDB, dengan prioritas pada program-program yang langsung berdampak pada peningkatan mutu, seperti pelatihan guru berkelanjutan berbasis kompetensi, pengembangan kurikulum vokasi yang disusun bersama asosiasi industri, pembangunan teaching factory dan laboratorium keterampilan, serta perluasan program magang bersertifikasi. Ketiga, pemerintah perlu belajar dari praktik terbaik Malaysia yang berhasil mencetak tenaga kerja produktif meskipun angka partisipasi sekolahnya rendah, terutama melalui integrasi yang erat antara pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan sektor industri. Program Technical and Vocational Education and Training (TVET) di Malaysia yang didanai bersama oleh pemerintah dan swasta, serta adanya sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional dan internasional, dapat menjadi model adaptasi bagi Indonesia. Keempat, penelitian lanjutan sangat diperlukan untuk mengidentifikasi secara lebih mendalam faktor-faktor kualitatif yang menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia, misalnya melalui studi tentang kualitas pengajaran di kelas, kesenjangan mutu antara sekolah di perkotaan dan perdesaan, efektivitas program sertifikasi kompetensi yang sudah berjalan, serta hubungan antara kurikulum dan kebutuhan industri di berbagai sektor. Akhirnya, tanpa reformasi mendasar yang mencakup peningkatan anggaran, perbaikan kurikulum, penguatan guru, dan kemitraan industri, bonus demografi yang seharusnya menjadi momentum emas bagi Indonesia justru dapat berbalik menjadi bencana demografi, di mana jutaan angkatan kerja muda memiliki ijazah tetapi tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan, sehingga terperangkap dalam pekerjaan informal berupah rendah atau menjadi pengangguran terdidik yang membebani negara. Oleh karena itu, komitmen politik dan keberanian untuk melakukan perubahan struktural dalam sistem pendidikan nasional menjadi keharusan yang tidak bisa ditunda lagi.

DAFTAR PUSTAKA

AshariP, A., & Muhammadiyah Kendari mujiati, U. (2018). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB SISWA PUTUS SEKOLAH MujiatiP 1. In *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan* (Vol. 18, Number 3).

-
-
- Bps, A. H., & Aceh, P. (2025). *FAKTOR PENYEBAB ANAK PUTUS SEKOLAH*. Retrieved www.bps.go.id
- Brummund, P., & Makowsky, M. D. (2026). Labor market monopsony and local clubs: Evidence from Indonesia. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 241. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2025.107379>
- Budi Suharto, R., Lestari, D., Mulawarman, U., Kuaro Gunung Kelua, J., & Timur, K. (2025). Education, Health, and Economic Factors Affecting Secondary School Participation and Dropout Rates in Indonesia. *The Es Economics and Entrepreneurship*, 3(03), 403–414. <https://doi.org/10.58812/esee.v3i03>
- Faliyandra, F., Saryono, D., Sayono, J., & Zainuddin, M. (2025). Participatory education for students at risk of dropping out of primary school in traditional farming communities. In *Social Sciences and Humanities Open* (Vol. 12). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101840>
- Grace, S., Bangquiao, M., & Galigao, R. P. (2025). *Economic bearing of school dropouts on human capital* (Vol. 4, Number 2).
- Gustian, D. (2025). *SCHOOL DROPOUT RATE IN THE SHADOW OF ECONOMIC CRISIS*.
- Irmawatie, L., Djoko, D., & Abstrak, W. (2012). PEMBERDAYAAN REMAJA PUTUS SEKOLAH MELALUI PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA. In *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 2, Number 1).
- Naz, G. M. (2024). *Correlating Reasons for Student Dropouts and Socioeconomic Factors at a State University from a Rural Province in the Philippines* *Journal of Multidisciplinary in Social Sciences* (Vol. 20, Number 1).
- Seputar, J., Ramadhan, D., Azka Qatrunnada, A., Aprilia, A., & Lukitoaji, B. D. (2025). *Diky Ramadhan1, Assita Azka Qatrunnada2, Atika Aprilia3, Beny Dwi Lukitoaji4* (Vol. 1, Number 1).
- Sukri, M., & Ramli, B. (2025). *EXAMINING THE IMPACT OF INCOME INEQUALITY AND GENDER ON SCHOOL COMPLETION IN MALAYSIA: A Machine Learning Approach Utilizing Malaysia's Public Sector Open Data*.
- Susilo, D., Wulandari, L. P. L., Sukmayeti, E., Asante, A., Jan, S., Thabrany, H., Tangcharoensathien, V., Wiseman, V., & Liverani, M. (2025). Can Indonesia achieve universal health coverage? Organisational and financing challenges in implementing the national health insurance system. *SJM - Health Systems*, 5, 100138. <https://doi.org/10.1016/j.ssmhs.2025.100138>